



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BELU
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TAOLIN AGUSTINUS
2. Jabatan : BUPATI
3. NHK : 752371

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **17.800.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/543 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 222 m2/180 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 246 m2/60 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
4. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
5. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **450.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOBIL, TOYOTA RIZE Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **3.200.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	15.149.700.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	776.537.658
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	34.179.437.658
III. HUTANG	Rp.	12.223.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.956.437.658

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.